BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

2.7 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif Kota Medan masih belum mencapai tingkat ideal sebagaimana diamanatkan oleh kebijakan afirmatif 30%. Dari total 50 kursi DPRD Kota Medan, hanya 8 kursi yang diisi oleh perempuan, dan 2 di antaranya berasal dari Partai Gerindra. Kondisi ini menunjukkan bahwa representasi perempuan masih rendah dan belum mencerminkan keterwakilan yang proporsional dalam pengambilan keputusan politik di daerah. **Secara deskriptif**, keterwakilan perempuan di DPRD Kota Medan dari Partai Gerindra masih rendah karena belum mencapai kuota 30% sebagaimana diamanatkan oleh kebijakan afirmatif. Hambatan utama muncul dari faktor biaya politik, budaya patriarki, serta kurangnya dukungan struktural dan sosial terhadap calon perempuan. **Secara substantif**, peran perempuan di DPRD Kota Medan sudah mulai terlihat melalui partisipasi aktif dalam pembahasan isu-isu perempuan dan anak. Namun, karena jumlah perempuan di parlemen masih terbatas, pengaruh mereka terhadap arah kebijakan publik belum maksimal. **Secara transformatif**, terdapat tanda-tanda perubahan positif melalui komitmen Partai Gerindra dalam memberikan ruang dan kesempatan lebih luas bagi kader perempuan untuk berkembang di ranah politik. Meski demikian, transformasi ini masih bersifat awal dan memerlukan dukungan berkelanjutan dari partai, masyarakat, dan lembaga

negara agar lebih signifikan. dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen dari Partai Gerindra pada Pemilu Legislatif tahun 2024 di Kota Medan masih berada pada tahap deskriptif dan mulai mengarah ke tahap substantif, namun belum mencapai tahap transformatif yang ideal.

2. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor keterwakilan perempuan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi afirmatif sebesar 30%, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. **Faktor Artikulasi Ide dan Gagasan Perempuan**, keterwakilan perempuan di parlemen sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam mengartikulasikan ide dan aspirasinya di ruang politik yang didominasi laki-laki. Keberanian, rasa percaya diri, kemampuan komunikasi, dan kesiapan mental menjadi modal utama bagi perempuan untuk menunjukkan eksistensinya. Berdasarkan hasil wawancara, anggota DPRD perempuan seperti Ibu Tia Ayu Anggraini menunjukkan bahwa sikap tegas, sopan, serta argumentasi yang berbasis data membuat gagasan perempuan lebih mudah diterima dalam forum politik. Selain faktor personal tersebut, dukungan struktural dari partai dan kepercayaan masyarakat juga berperan penting dalam memperkuat kemampuan perempuan menyuarakan isu-isu strategis. Dalam konteks ini, organisasi sayap *Perempuan Indonesia Raya (PIRA)* menjadi wadah penting bagi kader perempuan untuk meningkatkan kapasitas politik dan memperluas jejaring sosial mereka. **Faktor Pengaruh Ide terhadap Legislasi**, meskipun jumlah perempuan di parlemen masih terbatas, gagasan yang mereka perjuangkan mulai berpengaruh terhadap

kebijakan publik. Contohnya terlihat melalui lahirnya Peraturan Daerah tentang Kesetaraan Gender yang menjadi bukti bahwa ide-ide perempuan dapat berkontribusi terhadap legislasi apabila dikemas secara matang dan mendapat dukungan politik yang memadai. Namun, dominasi laki-laki di parlemen menyebabkan sebagian besar ide perempuan belum sepenuhnya terakomodasi menjadi kebijakan nyata. Dengan demikian, pengaruh perempuan terhadap legislasi sangat bergantung pada kombinasi antara kualitas gagasan, kemampuan advokasi, jaringan politik yang luas, serta keberanian untuk memperjuangkan isu-isu perempuan dan anak secara konsisten. **Faktor Peran Partai Politik**, Partai Gerindra memiliki peran signifikan dalam membuka ruang dan memberikan dukungan bagi kader perempuan untuk berpartisipasi aktif di dunia politik. Melalui program kaderisasi, pelatihan kepemimpinan, pendidikan politik, dan penempatan perempuan dalam nomor urut strategis pada daftar calon legislatif, partai berupaya agar keterwakilan perempuan tidak sekadar memenuhi kuota, tetapi juga bermakna secara substantif. Selain itu, *PIRA* berfungsi sebagai wadah penguatan kapasitas kader perempuan melalui kegiatan sosial dan pelatihan politik. Faktor penentu keterwakilan perempuan dapat dibagi menjadi internal, yakni keterbatasan waktu, kepercayaan diri, dan sumber daya finansial; serta eksternal, yaitu dukungan partai, pendampingan, pelatihan, dan ruang artikulasi politik. Dengan demikian, keterwakilan perempuan di Gerindra merupakan hasil kombinasi antara kesiapan individu dan dukungan dari partai serta lingkungan sosial.

2.8 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka beberapa saran peneliti berdasarkan penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kader perempuan diharapkan dapat terus mengembangkan kapasitas diri, memperkuat rasa percaya diri, serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan partai dan sosial masyarakat. Perempuan politisi perlu meningkatkan kemampuan analisis kebijakan, komunikasi politik, serta jejaring sosial agar dapat berkontribusi lebih besar dalam proses pengambilan keputusan di parlemen. Partai disarankan untuk memperkuat kebijakan internal dalam mendorong keterlibatan perempuan secara lebih bermakna di dunia politik. Upaya ini dapat dilakukan dengan meningkatkan proses kaderisasi, menyediakan pelatihan kepemimpinan dan pendidikan politik bagi perempuan, serta memastikan perempuan memperoleh posisi strategis dalam daftar calon legislatif. Partai juga perlu menindaklanjuti komitmen afirmatif 30% keterwakilan perempuan dengan tindakan nyata yang terukur dan berkelanjutan. Masyarakat juga perlu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya peran perempuan dalam politik agar dapat mendukung calon legislatif perempuan secara objektif dan proporsional. Perubahan pola pikir masyarakat yang masih patriarkal akan menjadi langkah awal menuju peningkatan keterwakilan perempuan yang lebih substantif di lembaga legislatif.
2. Kader perempuan perlu meningkatkan kemampuan dalam mengartikulasikan gagasan dan memperjuangkan isu-isu perempuan secara konsisten di

parlemen. Diperlukan peningkatan pengetahuan politik, kemampuan komunikasi berbasis data, serta penguatan jejaring lintas partai dan masyarakat sipil agar pengaruh perempuan terhadap proses legislasi semakin signifikan. Partai juga perlu memperkuat dukungan struktural bagi kader perempuan melalui peningkatan kapasitas organisasi sayap *Perempuan Indonesia Raya (PIRA)*, pemberian pelatihan advokasi kebijakan, dan dukungan logistik bagi calon legislatif perempuan. Partai juga disarankan untuk memperluas ruang partisipasi perempuan dalam posisi strategis partai agar keterlibatan mereka tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif dalam memengaruhi kebijakan publik.